

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi terhadap batasan-batasan berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksinya sehingga mendorong organisasi agar berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan. Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktifitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, seperti tekanan sosial, politik maupun ekonomi ( Verawati, J Darmawan, dan A Kariza, 2016).

Menurut Harahap (2014) legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Ini berarti apabila perusahaan mendapatkan

legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa datang.

### 2.1.2 Teori *Stakeholders*

Dalam suatu perusahaan pengungkapan sosial mulai menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi. Investor perlu mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan guna menghindari dampak yang timbul di kemudian hari yang disebabkan karena kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi juga harus memberi manfaat bagi *stakeholders*-nya (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat dan pihak lain). *Stakeholders* muslim mengharapkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial berbasis syariahnya, sehingga membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum Islam (Verawaty, J Darmawan, dan A Kariza, 2016)

Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholders* kepada perusahaan tersebut. Terdapat sejumlah *stakeholders* yang ada dimasyarakat, pengungkapan ISR cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan kelompok *stakeholders* yang berbeda. Tujuan utama dari perusahaan adalah seimbang dengan konflik antara *stakeholders*. Pengungkapan ISR bagi suatu perusahaan bersifat penting. Karena para *stakeholders* perlu mengevaluasi dan mengetahui sejumlah mana perusahaan dalam melaksanakan perannya sesuai dengan keinginan *stakeholders*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan ISR yang telah dilakukan (Verawati, J Darmawan, dan A Kariza, 2016)

### 2.1.3 *Islamic Social Reporting (ISR)*

*Islamic Social Reporting (ISR)* adalah ukuran yang digunakan oleh para peneliti untuk menilai seberapa besar pengungkapan tanggung jawab sosial menurut pandangan syariah. Tanggung jawab sosial (CSR) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas perusahaan terutama untuk perbankan syariah yang beroperasi dengan berlandaskan Alqur'an dan As-Sunnah. Kode etik dalam *social reporting* bersifat relatif, bisa saja peraturan mengenai *social reporting* dapat diterima oleh beberapa kelompok namun tidak dapat diterima oleh kelompok yang lainnya.

*Islamic Social Reporting* merupakan jawaban dan solusi akan kebutuhan para pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan perusahaan. Apalagi sejak berkembangnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya seperti perbankan, pegadaian, asuransi, koperasi, dan lain-lain, selain itu, *Islamic Social Reporting* ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting bagi reputasi dan kinerja lembaga keuangan syariah, karena dengan mengungkapkan ISR, lembaga keuangan syariah yang mengungkapkan ISR nya dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka (Lestari, 2016)

Dalam Islam telah dijelaskan dengan cukup jelas mengenai hak dan kewajiban baik itu bagi individu maupun bagi organisasi berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Oleh sebab itu masalah mengenai perbedaan tanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab akibat berbeda tempat ataupun waktu menjadi tidak relevan dalam islam (Maali 2006). (Othman dan Ameer 2015) menyatakan bahwa seorang auditor juga mempunyai peran penting dalam pelaporan sistem keuangan berdasarkan islam. Diperjelas lagi oleh (Grassa 2016) yang menyatakan bahwa sistem *islamic supervisor* juga menjadi sebuah langkah awal dalam pencapaian ISR. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna sudah sepatutnya bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT adalah dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Makna dari surat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merusak muka bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Akuntabilitas tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. Akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta alam. Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi Islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal dengan perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada system konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi informasi tertentu secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spritual mereka. Untuk itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Karena laporan tersebut tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna membantu perusahaan Islam dalam pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting* (ISR). Ketiadaan standar CSR secara syariah menjadikan pelaporan CSR perusahaan syariah menjadi tidak seragam dan standar.

Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar pengungkapan CSR karena tidak menyebutkan keseluruhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

item-item terkait CSR yang harus diungkapkan suatu perusahaan (Fitria dan Hartanti, 2010). Othman, Thani dan Ghani (2009) melakukan penelitian mengenai praktek pelaporan CSR perusahaan syariah yang listed di bursa Malaysia, dan hasilnya memperlihatkan bahwa kebanyakan masih pada tahap konseptual. Hal ini dikarenakan belum adanya standar yang bisa di adopsi perusahaan dalam penerapan CSR syariah tersebut. Penelitian dalam ranah CSR syariah umumnya menggunakan model *indeks Islamic Social Reporting* yang dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya.

Berikut ini adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka Islamic Social Reporting yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Pendanaan dan investasi (*Finance & Investment*)
2. Produk dan jasa (*Products and Services*)
3. Karyawan/ tenaga kerja (*Employees*)
4. Sosial (*Social*)
5. Lingkungan (*Environment*)
6. Tata Kelola Perusahaan/ Tata kelola organisasi (*Corporate Governance*).

**Tabel 2.1**  
**Tema Dan Item Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)**

No.	Tema dan Item Pengungkapan	Referensi
<b>A</b>	<b>Keuangan dan Investasi</b>	
1	Kegiatan yang mengandung Riba (contoh: beban bunga dan pendapatan bunga)	Haniffa (2002) Othman et al. (2009)
2	Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (Gharar)	Haniffa (2002) Othman et al. (2009)
3	Zakat (jumlahnya dan penerima zakat)	Haniffa (2002)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Othman et al. (2009)
4	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih	Othman et al. (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
5	Kegiatan Investasi(secara umum)	Haniffa (2007)
6	Proyek Pembiayaan secara umum	Haniffa (2007)
<b>B. Produk dan Jasa</b>		
7	Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk suatu produk	Haniffa (2007)
8	Glossary/defenisi setiap produk	Haniffa (2007)
9	Pelayanan atas keluhan nasabah	Haniffa (2007)
<b>C Tenaga Kerja</b>		
10	Jam kerja Karyawan	Othman et al. (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
11	Hari Libur	Othman et al. (2009)
12	Rasio Gaji/ Tunjangan Karyawan	Haniffa (2002) Othman et al. (2009)
13	Remunerasi karyawan	Othman et al. (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
14	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan (PSDM)	Othman et al. (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
15	Kesetaraan hak antara pria dan wanita	Othman et al. (2009)
16	keterlibatan karyawan	Haniffa (2007)
17	Kesehatan dan keselamatan kerja	Othman et al. (2009)
18	Lingkungan Kerja	Othman et al. (2009)
19	Karyawan dari kelompok khusus (misalnya cacat fisik atau mantan narkoba)	Othman et al. (2009)
20	Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan	Othman et al. (2009)
<b>D Sosial</b>		
21	Pemberian donasi (sedekah)	Haniffa (2002) Othman et al. (2009)
22	Wakaf	Othman et al. (2009)
23	Pinjaman untuk kebaikan (Qard Hasan)	Othman et al. (2009)
24	Zakat, sumbangan, atau sukarelawan dari kalangan karyawan dan nasabah	Othman et al. (2009)
25	Program pendidikan (beasiswa, pembangunan sekolah, dan fasilitas pendidikan lainnya)	Othman et al. (2009)
26	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah	Othman et al. (2009)
27	Pengembangan generasi muda	Othman et al. (2009)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

28	Peningkatan kualitas hidup masyarakat (pemberdayaan ekonomi)	Othman et al. (2009)
29	Kepedulian terhadap anak-anak (yatim-piatu)	Othman et al. (2009)
30	Menyokong kegiatan social kemasyarakatan/kesehatan/olahraga	Othman et al. (2009)
<b>E</b>	<b>Lingkungan</b>	
31	Konservasi lingkungan hidup	Othman et al. (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
32	Kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global (meminimalisasi polusi, pengolahan limbah, pengelolaan air bersih dan lain-lain)	Othman et al. (2009)
33	Pendidikan mengenai lingkungan hidup	Othman et al. (2009)
34	Penghargaan/ sertifikasi lingkungan hidup	Othman et al. (2009)
35	System manajemen lingkungan hidup	Othman et al. (2009)
<b>F</b>	<b>Tata Kelola Organisasi</b>	
36	Status kepatuhan terhadap syariah	Othman et al. (2009)
37	Rincian nama dewan komisaris dan dewan direksi/ manajemen	Haniffa (2002) Othman et al. (2009)
38	Profil jajaran dewan komisaris dan direksi/manajemen	Haniffa (2002) Othman et al. (2009)
39	Rincian dan tanggung jawab manajemen	Haniffa (2002) Othman et al. (2009)
40	Pernyataan mengenai remunerasi manajemen	Othman et al. (2009)
41	Jumlah pelaksanaan rapat manajemen	Othman et al. (2009)
42	Rincian nama dewan pengawas syariah	Othman et al. (2009)
43	Profil dewan pengawas syariah	Othman et al. (2009)
44	Rincian tanggung jawab DPS	Othman et al. (2009)
45	Pernyataan mengenai Remunerasi DPS	Othman et al. (2009)
46	Jumlah pelaksanaan rapat dewan pengawas syariah	Othman et al. (2009)
47	Struktur kepemilikan saham	Othman et al. (2009)
48	Kebijakan anti korupsi	Othman et al. (2009)

Sumber: Rizkiningsih (2012)

#### 2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance*. *Corporate Governance* dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemilik Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011: 1).

GCG dalam konteks Islam berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keislaman. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keislaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam (Susanto, 2011).

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksana pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*) yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya (Machmud & Rukmana, 2009: 80) .

Susanto (2011) mengatakan *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip: tauhid, taqwa dan ridha, kemaslahatan dan ekuilibrium (Keseimbangan dan keadilan). *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan demikian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan prinsip GCG dalam perbankan syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada. Di samping itu, ia juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sehingga pada akhirnya didapatkan tata kelola bank yang selain dapat memberikan keuntungan bagi para stakeholders, juga tetap berjalan di atas rel/koridor syariah (Machmud & Rukmana, 2009: 79).

Menurut Ningrum (2013), Mekanisme dan struktur governance di perusahaan dapat dijadikan infrastruktur pendukung praktek dan pengungkapan CSR di Indonesia. Struktur *governance* yang berlandaskan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) akan mendorong kegiatan CSR dan pelaporannya. Jika struktur governance yang dipresentasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional mengutamakan kepentingan perusahaan (sesuai dengan teori *stakeholders*), maka kegiatan dan pelaporan CSR seharusnya berjalan dengan baik di perusahaan tersebut. Jadi, untuk melaksanakan CSR dengan baik perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

### 2.1.5 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2-5 orang untuk bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum syariah dan unit usaha syariah. Persyaratan anggota DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), DSN sendiri adalah dewan yang dibentuk oleh majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk dalam kegiatan bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dewan pengawas syariah yang besar akan menjalankan tugas untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip islam lebih baik, dan diharapkan dewan pengawas syariah juga berperan dalam mewajibkan aktifitas social dan juga pengungkapan *Islamic Social Reporting* bank syariah. Sehingga dapat diduga bahwa bank dengan keberadaan dewan pengawas syariah akan melakukan pengungkapan Islamic Social Reporting dengan baik (Ramadhani, 2016). Ukuran dewan pengawas syariah perusahaan tercantum pada laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia. Skala pengukuran ini menggunakan skala nominal (Khoirudin, 2013)

Dalam menjalankan tugasnya, DPS bersifat aktif atau responsif. DPS seharusnya secara aktif melakukan supervisi, mengumpulkan data, menganalisis, dan melakukan koreksi terhadap berbagai temuan ketidakpatuhan syariah pada sebuah bank Islam. Memastikan bahwa pedoman operasional dan setiap aspek operasi bisnis bank telah sesuai koridor syariah. Inilah cakupan fungsi review dari DPS. DPS bersifat responsif dan berkontribusi aktif ketika bank Islam, dimana dia berada, hendak mengeluarkan produk baru atau masuk ke lini bisnis baru sehingga membutuhkan pedoman operasional yang baru. Meskipun bukan pihak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat, selama proses pengembangan produk baru dan pembuatan pedoman operasional agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, mau tidak mau DPS akan berkontribusi aktif dalam aktivitas riset yang mendalam (Wahyudi, 2013: 158).

Menurut Rustam (2013: 414) Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27 peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada Fatwa nya.
4. Melakukan pengkajian ulang/evaluasi secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Menurut Greuning dan Iqbal (2011: 182) pada prinsipnya, dewan pengawas syariah bertanggung jawab atas lima bidang utama: sertifikasi instrumen keuangan yang diperbolehkan melalui fatwa-fatwa, verifikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan transaksi dengan fatwa yang dikeluarkan, perhitungan dan pembayaran zakat, pencoretan pendapatan yang tidak sesuai syariat, dan saran mengenai distribusi pendapatan atau beban antara pemegang saham bank dan pemegang akun investasi.

Masing-masing dewan pengawas syariah mengeluarkan laporan untuk mengesahkan kepatuhan syariat atas seluruh transaksi keuangan. Laporan ini biasanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan perusahaan.

#### 2.1.6 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan otoritas terkait (Rustam, 2013: 400). Dikaitkan dengan prinsip dan aturan *corporate governance*, maka Komisaris memegang peranan yang sangat penting di dalam perusahaan. Dalam kerangka *corporate governance* Komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Fungsi akuntabilitas komisaris ini ditujukan agar perlindungan terhadap para penanam modal (seperti pemegang saham, bank sebagai kreditor, dan lembaga dana pensiun) serta *stakeholders* lainnya (seperti buruh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, customers, lingkungan hidup serta masyarakat di sekitarnya) dikelola oleh perusahaan dengan baik (Sutedi, 2011: 147).

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peranan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya :“wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-Nisa: 135).

Kandungan dari ayat diatas menjelaskan bahwa dewan komisaris dalam menjalankan perannya harus memiliki karakter yang baik , jujur, adil dan dapat dipercaya. Tanggung jawab utama atas cara bank melakukan usaha ada pada dewan komisaris. Dewan menetapkan arahan strategis, menunjuk manajemen, menetapkan kebijakan operasional, dan yang paling penting bertanggung jawab untuk memastikan tingkat kesehatan bank. Dewan bertanggung jawab kepada deposan dan pemegang saham untuk administrasi lembaga yang sesuai hukum, jelas efisien dan mampu.

Para anggota dewan biasanya mendelegasikan manajemen sehari-hari dari perbankan kepada direksi dan karyawan, tetapi anggota dewan bertanggung jawab atas konsekuensi dari kebijakan yang tidak sehat atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ceroboh dan praktik-praktik menyangkut pinjaman, investasi, perlindungan terhadap penipuan internal, atau kegiatan perbankan lainnya (Greuning dan Iqbal, 2011: 36). Menurut Sutedi (2011: 155), Dalam kaitannya terciptanya perusahaan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka dianggap perlu adanya komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lainnya atau anggota direksi, atau hubungan keuangan dan hubungan kepemilikan saham dengan BUS sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi.
3. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BUS.
4. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUS atau dalam rapat umum pemegang saham.

Menurut Greuning dan Iqbal (2011: 36) komposisi anggota dewan komisaris sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 60 persen bank yang gagal memiliki anggota dewan yang tidak memiliki pengetahuan mengenai perbankan atau kurang informasi dan pasif tentang urusan pengawasan bank. Kegagalan bank-bank hampir selalu diakibatkan karena kekurangan dalam dewan komisaris dan direksi mereka. Kepemimpinan yang diberikan oleh dewan komisaris dari lembaga-lembaga bermasalah sering terbukti tidak efektif. Dewan komisaris yang efektif harus memiliki pemahaman yang baik tentang sifat usaha bank dan resiko yang terkait.

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan setidaknya satu kali dalam dua bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri setidaknya oleh dua per tiga dari jumlah anggota Dewan Komisaris (Rustam, 2013: 400).

### **2.1.7 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

Prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan kepemilikan dalam Al-qur'an. Kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan komunis.

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu” (Ali Imran: 189).

Ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah sebagai penguasa mutlak dan hakiki atas segala sesuatu. Kekuasaan Nya sangat luas dan tidak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pemegang saham berada dalam posisi untuk menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab atas proses tata kelola perusahaan dan harus mengawasi tindakan mereka secara hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak berniat menggunakan bank semata-mata untuk membiayai perusahaan mereka atau perusahaan rekan. Dengan menunjuk dewan pengawas dan menyetujui dewan komisaris, komite audit dan auditor eksternal, para pemegang saham berada dalam posisi untuk menentukan arah bank (Greuning dan Iqbal, 2011: 35).

Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat (Muttaqin, 2013).

### 2.1.8 Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Kinerja keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang dilihat dari profitabilitas suatu perusahaan. Pengungkapan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan mencerminkan suatu pendekatan perusahaan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan bersifat multidimensi. Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan (Sembiring, 2005).

Menurut Greuning dan Iqbal (2011: 113) banyak faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas sebuah bank. Dalam beberapa kasus, inflasi dapat meningkatkan biaya operasi lebih cepat daripada pendapatan yang diterima. Dalam mengukur profitabilitas terdapat tiga jenis pengukuran yang biasa digunakan. Tiga rasio ini merupakan ukuran yang paling dikenal dan paling luas penggunaannya diantara rasio-rasio keuangan yang lain. Dalam setiap bentuknya, rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan telah menggunakan aset dan mengelola operasinya. Fokus dari kelompok ini adalah pada hasil akhir, yaitu laba bersih (Ross et al, 2009: 89).

Laba bersih diperoleh ketika pendapatan melebihi pengeluaran. Untuk melihat seberapa besar laba perusahaan maka dapat dilihat pada laporan laba

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rugi dari perusahaan tersebut. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan selama suatu periode waktu tertentu. Dalam laporan laba rugi, pendapatan disajikan pertama kali baru setelah itu diikuti dengan beban. Terakhir laba bersih atau rugi bersih akan dihitung dengan cara total pendapatan dikurangi total beban (Weygandt, 2009: 31). Pengertian laba dalam al-Qur'an ialah kelebihan atas modal pokok atau pertambahan atas modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Dalam hadis disebutkan: "Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang; ia tidak akan menerima laba sebelum mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan amalan wajibnya." ( HR. Bukhori dan Muslim ).

Dari hadis di atas dapat diketahui pengertian laba ialah bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Adapun cara untuk mengukur profitabilitas dapat dilakukan melalui: (1).Margin laba, (2).Pengembalian aset, dan (3). Pengembalian ekuitas. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah pengembalian aset (*return on assets*-ROA). Alasan dipilihnya ROA sebagai alat ukur kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah bahwa ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RO7A adalah ukuran laba per rupiah aset. Rasio ini dapat dinyatakan dengan beberapa cara, tetapi yang paling umum adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Karena ROA biasanya ditujukan untuk mengukur kinerja selama satu periode tertentu, akan masuk akal jika mendasarkannya pada aset rata-rata (Ross et al, 2009: 90). Menurut Weygandt et al (2009: 16) Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis. Aset digunakan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas, seperti produksi, konsumsi dan jual beli. Karakteristik umum yang dimiliki oleh asset adalah kemampuan untuk memberikan jasa atau manfaat di masa mendatang.

### 2.1.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar dan kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktifitas yang lebih besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin banyak modal yang ditanamkan sehingga sumberdaya dan dana yang besar dalam perusahaan cenderung memiliki permintaan yang lebih luas akan informasi pelaporan perusahaannya dengan diukur menggunakan total asset sebagai berikut :  $\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{total asset})$  (Sunarsih dan Ferdiyansyah, 2017)

Pada perbankan ukuran perusahaan (*size*) lebih cenderung dilihat dari total asetnya mengingat produk utamanya adalah pembiayaan serta investasi. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dinilai dari total asset. Hal ini dikarenakan total asset menunjukkan jumlah kepemilikan asset yang dimiliki perusahaan dilihat dari penjumlahan asset lancar dengan asset tetap sehingga total asset dinilai lebih mempresentasikan apakah suatu perusahaan masuk dalam kategori perusahaan ukuran besar atau kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Pada tabel berikut akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu beserta hasilnya.

**Tabel 2.2**  
**Review Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	TAHUN	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1	Inuzela	2017	Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i>	Dependen : ukuran pengungkapan ISR Independen : ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dps	ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>islamic social reporting</i> , profitabilitas berpengaruh negative dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR
2	Ramadhani	2017	Pengaruh Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>	Dependen (y): <i>Islamic Social reporting</i> Independen : ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dps	Ukuran perusahaan, leverage dan ukuran dps berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					pengungkapan ISR
3	Sunarsih dan Ferdiansyah	2017	<i>Determinants of the Islamic Social reporting disclosure</i>	Dependen : <i>Islamic Social Reporting</i>  Independen : sukuk, Company size, profitability	:Size berpengaruh terhadap <i>Islamic social reporting</i> , profit, sukuk tidak berpengaruh terhadap <i>Islamic social reporting</i>
4	Lestari	2016	Pengaruh tingkat profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Umur perusahaan terhdapan pengungkapan ISR pada perbankan syariah	Dependen: Pengungkapan ISR  Independen : Profitabilitas, leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan	Profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
5	Jannah dan Ansori	2016	Determinant the Islamic Social Reporting Disclosure	Dependen : <i>Islamic Social Reporting</i>  Independen : <i>Sukuk</i> , <i>Company size</i> , <i>Profitability</i>	:Size berpengaruh terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> , profit, sukuk tidak berpengaruh terhadap <i>Islamic social reporting</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Verawaty Darmawan, dan A Kariza	J2016	Determinan pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index	Dependen: Pengungkapan ISR pada perusahaan di JII Independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, likuiditas, leverage	Ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, leverage tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR
7	Yulianti, Leis, Suzanawaty, Zuwesti, Eka putri, Isnawati, Haribowo	2016	<i>Determinant of the Islamic social reporting disclosure</i>	Dependen (y) : <i>Islamic social reporting</i> . Independen: <i>Corporate saretary, firm age, firm size, leverage, proportion of independent ommisioner</i>	Firm size, firm age berpengaruh terhadap Islamic social reporting
8	Rosiana Rita, Bustanul, Arifin dan Muhammad, Hamdani	2015	Pengaruh Ukuran Perusahaan, profitabilitas, leverage dan Islamic social governance terhadap	Dependen : Pengungkapan ISR Independen : ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan	Ukuran perusahaan berpenaruh posiif terhadap pengungkapan ISR, profitabilitas, leverage dan Islamic social



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pengungkapan	Islamic social governance	governance tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
9	Ahmad Nasir	2015	Pengaruh Ukuran Perusahaan, profitabilitas, Tipe Kepemilikan dan Tipe industry terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI	Variable X : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Kepemilikan dan Tipe Industri Variabel Y : <i>Islamic Social Reporting</i>	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan profitabilitas, tipe kepemilikan dan tipe industry berpengaruh negative dan signifikan terhadap pengungkapan ISR
10	Firda Istiani	2015	Pengaruh Ukuran Bank, Profitabilitas, likuiditas, dan <i>leverage</i> terhadap pengungkapan	Variable X: Ukuran Bank, Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Leverage</i> Variable Y: <i>Islamic Social</i>	Ukuran bank, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			ISR(Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014)	<i>Reporting</i>	likuiditas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
11	Wawan Sudrajat	2014	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	Variable X: Kinerja Keuangan, Ukuran perusahaan Dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i>  Variabel Y: <i>Islamic Social Reporting</i>	X: ROA, CAR, Kinerja keuangan, dewan pengawas syariah dan dewan komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan isr, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

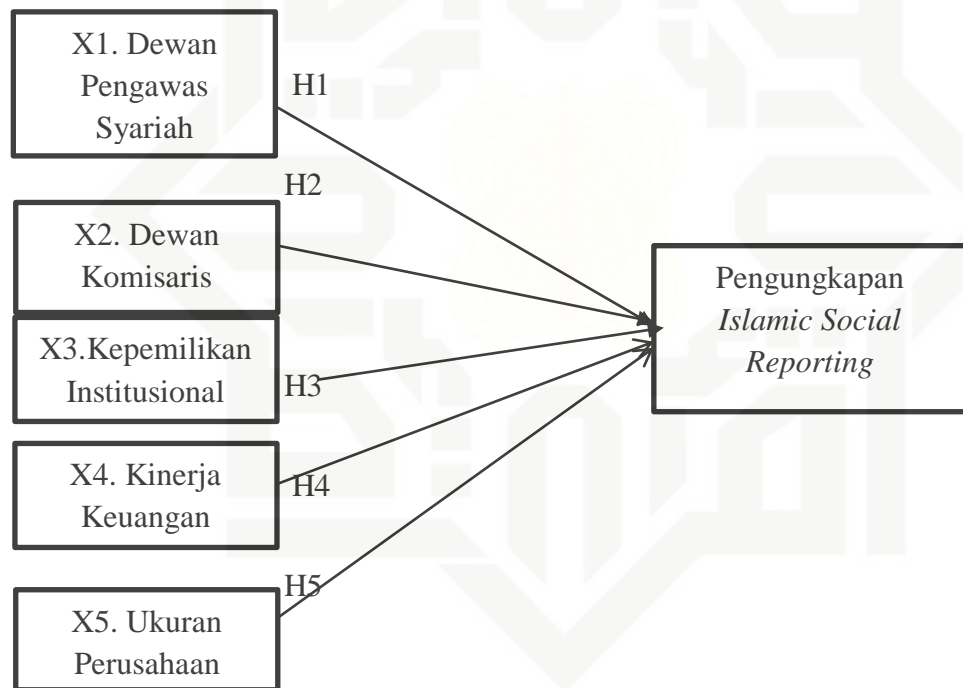
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Kerangka Penelitian

Gambar II.2 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan empat faktor perusahaan yang berpengaruh untuk mengungkapkan ISR. Kelima faktor tersebut antara lain: Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan

**Gambar II.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Good Corporate Governance dan Islamic Social Reporting

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* sangat terkait dengan konsep *Good Corporate Governance*. Konsep pada GCG menekankan pada *internal balance* antara organ perusahaan dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan eksternal balance atau tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholder (Dipika, 2014). Adapun hipotesis mengenai GCG dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu :

#### 2.4.2 Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Islamic Social Reporting

Faktor yang diduga mempengaruhi ISR adalah ukuran dewan pengawas syariah. Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.

Penelitian Ningrum, dkk (2013) menemukan bahwa *Islamic Governance* (sebagai proksi *corporate governance* di bank Islam) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam variabel *Islamic Governance* tersebut dibahas mengenai jumlah dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

#### 2.4.3 Ukuran Dewan Komisaris dan Islamic Social Reporting

Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring, 2005). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan pengungkapan Islamic social reporting akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Hasil penelitian Khoirudin (2013) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

#### 2.4.4 Kepemilikan Institusional dan *Islamic Social Reporting*

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki *power* dan *experience* serta bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan secara sukarela, hal ini berarti kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Hariyanti, 2012 dalam Ningrum dkk, 2013). Murwaningsari (2009) yang menyatakan bahwa institusional shareholders dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas monitoring yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya.

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4.5 Kinerja Keuangan dan *Islamic Social Reporting*

Kinerja keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang dilihat dari profitabilitas suatu perusahaan. Adapun cara untuk mengukur profitabilitas dapat dilakukan melalui: (1). Margin laba, (2). Pengembalian aset, dan (3). Pengembalian ekuitas. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah pengembalian aset (*return on assets*-ROA). Alasan dipilihnya ROA sebagai variabel independen adalah bahwa ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar (Ningrum, 2013).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Othman et al (2009) dan Ningrum (2013) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pembahasan di atas, penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H4 : Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

#### 2.4.6 Ukuran Perusahaan dan *Islamic Social Reporting*

Penelitian yang terkait dengan ukuran perusahaan dan ISR (*Islamic Social Reporting*) juga pernah dilakukan oleh Othman et.al (2009) dan Raditya (2012) yaitu ukuran perusahaan secara positif signifikan mempengaruhi tingkat ISR. Penelitian Desta (2013) membuktikan bahwa perusahaan yang lebih besar akan mengungkapkan ISR lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan – perusahaan besar mungkin memiliki potensi konflik antara manajemen dan *stakeholders*. Dalam usaha mengurangi konflik perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak dan sukarela dalam laporan tahunannya karena akan memperlihatkan akuntabilitas mereka kepada para *stakeholders*.

H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

UIN SUSKA RIAU